#### **SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK)

## **KABUPATEN JENEPONTO**

## **RESKY ANANDA PUTRI**

E011 17 1 512



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021



#### UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Resky Ananda Putri

NIM

E011 17 1512

Program Studi

: Ilmu Administasi Publik

Judul

Implementasi KebijakanKeterbukaan

Informasi Publik (Studi Kasus Dinas

Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurdin Nara, M.Si NIP 19630903 198903 1 002

Adnan Nasution, S.Sos., M.Si NIP 19740707 200501 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik

Dr. Nurdin Nara, M.Si NIP 19630903 198903 1 002

S Scanned with ComS



# UNIVERSITAS HASANUDDIN

# FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: Resky Ananda Putri

NIM

: E011171512

Program Studi

: Administrasi Publik

Jenjang

: S1

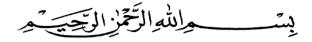
Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto" Adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 3 September 2021



CS Scanned with CamScanne

#### **KATA PENGANTAR**



Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur, penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhana wa ta'ala, pencipta alam semesta atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto" yang merupakan salah satu persyaratan untuk lulus dari Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan mendapatkan gelar sarjana. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dalam bertindak.

Ucapan terima kasih tak lupa juga penulis ucapkan untuk kedua orang tua penulis Nasir dan Hasma. Terima kasih yang sebesar-sebesarnya untuk Ibunda penulis yang telah mendidik dan merawat penulis dari kecil sampai saat ini, hingga penulis bisa menapaki jenjang pendidikan yang lebih layak lagi. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda yang telah berjuang memberikan kehidupan yang layak sehingga penulis dapat hidup dengan baik sampai sekarang ini. Terima kasih untuk setiap perjuangan dan juga do'a dari orang tua penulis, semoga Ayah, Ibunda dan saudari penulis dirahmati oleh Allah SWT, aamiin. Tidak lupa juga

penulis haturkan banyak terima kasih kepada keluarga besar, om, tante, sepupu dan kerabat serta sahabat dekat penulis lainnya yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi dengan cepat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku pembimbing 1 (satu) dan bapak Adnan Nasution, S.Sos M.Si selaku pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sampai menyelesaikan penulisan skripsi, yang dimana beliau telah mendampingi dari awal studi sampai persiapan penulisan serta terselesainya penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
- 2. **Dr. Muh.Tang Abdullah, S.Sos., M.AP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
- 3. **Adnan Nasution, S.Sos., M.Si** selaku penasehat akademik selama kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.

- 4. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Adnan Nasution, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
- 5. **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si** dan **Amril Hans. S. AP., M.PA** selaku dewan penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
- 6. **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
- Staff Departemen Ilmu Administrasi dan staff di lingkup FISIP
   UNHAS tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
- 8. Pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kabupaten Jeneponto yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini
- 9. Drs. Suardi, M.AdmPemb. selaku kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kabupaten Jeneponto yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

- 10. Saudara saya Nunu dan Al-ghazali yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
- 11. Teman seperjuangan **LEADER'17** (*Loyalty & Educated of Administrative Generations*) terimakasih telah menjadi saudara selama 3 tahun di kampus Universitas Hasanuddin ini. Telah memberikan pengalaman dan cerita tersendiri selama ini.
- 12. Teman-teman **SOSPOL'17** telah menjadi saudara dan memberikan kenangan manis selama ini.
- 13. **PAGUYUBAN KSE UNHAS** Terima kasih atas semangat, bantuan, dan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
- 14. Segenap Keluarga Besar HUMANIS FISIP UNHAS terimakasih atas pengalaman, pengetahuan serta kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan kepada penulis.
- 15. Teman-teman **Presidium 2019-2020 HUMANIS FISIP UNHAS**(Masyita, Waddah, Mardiah, Rijal, kak Ica, Adhe, Saldy dan Fifah)
  yang telah memberi pengalaman selama meniti pendidikan dikampus
- 16. Kanda-kanda RECORD'13, UNION 014, CHAMPION 015, FRAME 016 adik-adik LENTERA'18, MIRACLE'19, PENA'20 yang telah berbagi pengalaman selama berorganisasi di HUMANIS FISIP UNHAS.
- 17. Teman-teman dan adik-adik **Departemen advokasi & pengabdian** masyarakat ( Reviva, Feby, Ifah, Kintan, Ayu, Restu dan adik Dien,

- Sandi, Reskinah, dan Irma) atas pengalaman yang telah ditorehkan Bersama penulis.
- 18. Kepada Darwis, Feby, Waddah, Kintan dan Febiana, yang banyak membantu penulis selama meniti Pendidikan di kampus
- 19. Kepada **Nisma, Rijal, Fitri** yang telah memberi hiburan dan dukungan selama dikampus.
- 20. Kepada Saldy, Ayu, Wulan, Nisa, Mardiah, Supri, Pipo, Ayu, Restu, kak Ica, Azhar, dan Tomy yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan jokes dan hiburan tersendiri bagi penulis.
- 21. Kepada Kak Udin, kak Riswan, kak Herman, kak Said, kak Suaib, kak Enal, Kak Edy, kak Rama, kak Mail telah memberi pengalaman tersendiri dan memberi dukungan semangat kepada penulis selama penulis meniti pendidikan dikampus.
- 22. **Kak Wahyu dan Dipa** telah memberikan pelatihan mental dan dukungan kepada penulis selama meniti pendidikan di kampus.
- 23. Kak Illang, kak Iccu, kak Asri, kak Anty, kak Riska, kak Riswan, Iwan, Fajar, Akbar, dan dilla, telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tepat waktu.
- 24. Kepada Azmi, Nurul & Ihlas telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik

dari pembaca yang sehat dan membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Terima kasih , Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatu.

Makassar, 3 September 2021

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II.1. Konsep Kebijakan Publik	6
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	6
II.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik	8
II.1.3 Tujuan Kebijakan Publik	8
II.1.4 Tahapan Kebijakan Publik	10
II.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	11
II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	11
II.2.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan	12
II.2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan	15
II.3. Konsep Informasi	27
Gambar II.3. Tahap-Tahap Penanganan Informasi	28
II.4. Konsep Keterbukaan Informasi	28
II.5. Konsep Good Governance	32
II.6. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
III 1 Pendekatan Penelitian	37

III.2. Lokasi Penelitian	37
III.3. Tipe Penelitian	37
III.4. Fokus Penelitian	37
III.5. Jenis Data	44
III.6. Informan	45
III.7. Teknik Pengumpulan Data	45
III. 8. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN	48
IV.1. Gambaran Umum Instansi	48
IV.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto	48
IV.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan S	tatistik
IV.4. Keadaan Sumber daya manusia Dinas Komunikasi Infordan Statistik	matika
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
V.1. Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto	
V.1.1 Komunikasi	62
V.1.2 Sumber Daya	73
V.1.3. Disposisi	76
V.1.4. Struktur Birokrasi	79
BAB VI PENUTUP	86
VI.1. Kesimpulan	86
VI.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
I AMPIRAN	92

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Gambar II.2 Model Implementasi Edward III
Gambar II.3 Tahap-Tahap Penanganan Informasi
Gambar II.4 Kerangka Pikir
Gambar V.1. Tampilan Website Kabupaten Jeneponto68
Gambar V.2. Tampilan Kolom Kinerja Pemerintahan, Transparansi Anggaran, Perencanaan Daerah dan Layanan Publik
Gambar V.3. Tampilan "Pengumuman" di Laman Web Resmi Kabupaten  Jeneponto
Gambar V.4.Tampilan Dokumentasi Kegiatan di Laman Web Kabupaten Jeneponto
Gambar V.5. Daftar Aplikasi dan Website Terintegrasi pada Sub Domain jenepontokab.go.id
Gambar V.6. Alur Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik81
Gambar V.7. Formulir Layanan Informasi Publik
Gambar V.8. Formulir Surat Pernyataan Keberatan atas Informasi83
Gambar V.9. Formulir Pemberitahuan Tertulis84

# DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	.59
Tabel IV.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan	.59
Tabel IV.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon	.60

#### UNIVERSITAS HASANUDDIN



# FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

## **ABSTRAK**

Resky Ananda Putri, nomor pokok E011171512 menyusun skripsi yang berjudul: Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto dibawah bimbingan bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si dan bapak Adnan Nasution, S.Sos., M.Si.

Penelitian yang dilakukan penulis secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan informan yakni kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika kabupaten Jeneponto, kepala bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik, kepala bidang aplikasi dan informatika, kepala seksi pengelolaan media, komunikasi dan penyediaan informasi, kepala seksi layanan informasi publik beserta masyarakat setempat, yang dimana fokus penelitiannya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika di Kabupaten Jeneponto belum terlaksana dengan baik hal tersebut dikarenakan belum optimalnya penyebaran informasi di media massa sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan keefektifan dalam mengakses informasi publik.

Kata kunci: Implementasi, keterbukaan informasi, pemerintah kabupaten.

#### UNIVERSITAS HASANUDDIN



## FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

#### **ABSTRACT**

Resky Ananda Putri, principal number E011171512 compiled a thesis entitled: Implementation of Public Information Disclosure Policy (Case Study of the Information and Statistics Communication Service) Jeneponto Regency under the guidance of Dr. Nurdin Nara, M.Si and Mr. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si.

The research conducted by the general author aims to describe how the implementation of public information policies at the Department of Communication and Statistics (DISKOMINFOTIK) of Jeneponto Regency with qualitative descriptive research with informants namely the Head of Public Relations, Public Information and Communication, Head of Applications and Information Technology, Section Head of Media Management, Communication and Provision. information, the head of the public service section and the local community, whose research focus is on communication, resources, disposition, and employee information. The data collection used is interviews, documentation and observation.

The results of the research conducted by the author indicate that the implementation of public information policies at the Information and Statistics Communication Service in Jeneponto Regency has not been carried out properly, this is because the dissemination of information in the mass media has not been optimal so that people have not fully felt the effectiveness in accessing public information.

**Keywords: Implementation, information, district government** 

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### I.1. Latar Belakang

Salah satu tema penting dalam perbincangan demokratisasi di Indonesia adalah keterbukaan informasi publik. Indonesia memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertujuan untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Secara fundamental, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, perlu adanya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* (kepemerintahan yang baik) yang bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintahan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam iimemperoleh informasi. Transparansi informasi diperlukan

agar pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif.

Good Governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan Good Governance. Santosa(2008:131), syarat bagi terciptanya good governance, yang merupakan prinsip dasar meliputi partisipatoris, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus, persamaan hak, efektif dan efisiensi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik yang merupakan unsur penting dari good governance. Partisipasi publik sangat penting dalam mendorong kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengharuskan adanya transparansi informasi tentang penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang lebih baik.

Pemerintah Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 115 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi

dan dokumentasi di pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan, yang sejawarnya harus turut andil dalam tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2019 membentuk Peraturan Bupati (PERBUP) No.41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (PPID) yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Sejalan dengan tujuan PERBUB No.41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto yang mempunyai maksud dan tujuan untuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangannya serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Namun dewasa ini, penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara penyebaran informasi berdasarkan ketentuan PERBUB No.41 Tahun 2019 tentang PPID dengan informasi yang ditemukan pada situs resmi Kabupaten Jeneponto yang dikelola oleh pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori implementasi dari George Edward III dengan menggunakan empat variabel kebijakan yakni Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya, dan Struktur Birokrasi

sebagai upaya melihat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto.

Adapun penelitian yang memiliki kesesuaian dengan topik penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Milhani (2018) dengan judul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Informasi Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sidenreng Rappang)". Dalam penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa "kebijakan keterbukaan informasi public dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal yang mesti diperbaiki ataupun ditingkatkan agar sesuai dengan sebagaimana mestinya". Perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya dengan topik penelitian ini terletak dari fokus penelitian dan lokasi penelitian yang dilakukan. Topik penelitian ini berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik, dalam hal ini pengelolaan situs resmi pemerintah daerah di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kabupaten Jeneponto. Dengan demikian yang menjadi kesamaan dari penelitian terdahulu dengan topik penelitian ini adalah adanya kesamaan dalam mengambil model implementasi kebijakan menurut Edrward III. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto"

#### I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Jeneponto?

## I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Jeneponto.

#### I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- Manfaat Akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik / pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai pengkajian masalah implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto.
- 2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik di Kabupaten Jeneponto. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jeneponto.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## II.1. Konsep Kebijakan Publik

## II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah berupa keputusan politik dalam melakukan arah tindakan tertentu secara terencana. Hal tersebut sejalan dengan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh *United Nation* dalam Wahab (2011) yang mengatakan bahwa kebijakan ialah pedoman umum atau khusus, luas atau sempit, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, maupun publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Hogwood dan gunn dalam Cairney (2012:07) mengidentifikasi berbagai cara untuk memahami 'kebijakan': sebagai label untuk bidang kegiatan (misalnya kebijakan kesehatan); ekspresi niat (misalnya 'kami akan meningkatkan perawatan kesehatan'); proposal khusus (misalnya manifesto atau kertas putih); keputusan pemerintah dan otorisasi resmi keputusan (misalnya undang-undang); program, atau paket undang-undang, kepegawaian, dan pendanaan; hasil antara dan akhir (misalnya lebih banyak dokter, perawatan medis yang lebih baik); hasil, atau apa yang sebenarnya dicapai (kesehatan masyarakat yang lebih baik); dan proses dan serangkaian keputusan, bukan peristiwa dan keputusan tunggal. Memberikan deskripsi lebih lanjut tentang kebijakan publik, tetapi literatur umumnya mempertanyakan kemampuan kita untuk mendefinisikan kebijakan.

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Thomas R. Dye dalam Widodo (2021:12) mengartikan kebijakan publik sebagai

"whatever government choose to do or not to do".

(apapun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan)

Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Widodo (2021:18), yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah

"what governments say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs"

(apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan. Itu adalah maksud atau tujuan program pemerintah)

George C. Edward III dan Ira Sharkansky dalam Widodo (2021:18) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan

"What is stated and done or not done by the government that can be determined in laws and regulations or in policy statementas in the form of speeches and discourses expressed by political officials and government officials which are immediately followed up with government programs and actinos"

(Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah)

Kedua definisi baik Thomas R.dye dan Edwards III dan Sharkansy samasama menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal " Keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun."

## II.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Yehezkel Dror dalam Uddin dkk (2017:32) mengemukakan ciriciri kebijakan publik sebagai berikut :

- a) Sangat kompleks
- b) Prosesnya bersifat dinamis
- c) Komponen-komponen beraneka ragam
- d) Peran masing-masing substruktur berbeda-beda
- e) Memutuskan
- f) Sebagai pedoman umum
- g) Untuk mengambil tindakan
- h) Diarahkan pada masa depan
- i) Dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah
- j) Dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan
- k) Apa yang tercermin dalam kepentingan umum dan
- 1) Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin

## II.1.3 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Hayat (2018:33-34) dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, Formulasi* mengemukakan tujuan kebijakan publik dapat dibedakan melalui :

- Sumber daya atau resources, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara. Sebagai contoh, kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumberdaya.
- 2. Regulatif dan deregulatif, kebijakan bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM dan sebagainya. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat membebaskan seperti kebijakan privatisasi dan kebijakan penghapusan tarif.
- 3. Dinamisasi dan stabilisasi, kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumberdaya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan desentralisasi. Sedangkan kebijakan stabilisasi adalah menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial. Contoh kebijakan ini adalah kebijakan tentang keamanan negara dan kebijakan penetapan suku bunga.
- 4. Memperkuat negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran negara, seperti kebijakan tentang pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai pelaku utama pendidikan nasional daripada publik. Sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara, seperti kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kebijakan Perseroan Terbatas (PT).

## II.1.4 Tahapan Kebijakan Publik

Dunn dalam (Sobirin & Uddin, 2017:24-31) memiliki pendapat tentang tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut :

## 1. Penyusunan Agenda

Agenda *setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik.

## 2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

## 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar mendukung pemerintah.

## 4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

## II. 2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

## II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Van meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:133) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Langkai dalam Sutmasa (2021:29) suatu kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan kunci dari keberhasilan kebijakan publik, kebijakan publik, rencana adalah 20 persen keberhasilan, implementasi 60 persen, 20 persen sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.

Webster dalam Sutmasa (2021:27-28) implementasi mengimplementasikan (implementation, to implement) berarti "to provide means for carrying out"

(menyediakan alat bantu atau sarana untuk melaksanakan sesuatu); "to give pracitical effect to" (menimbulkan dampak atau berakibat sesuatu). Itu berarti bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan berupa intervensi atau manipulasi atas hal/aspek tertentu dalam kehidupan bersama sebagimana tertuang dalam formulasi kebijakan, menggunakan atau memanfaatkan sumberdaya baik manusia, finansial, maupun organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, dengan maksud menimbulkan dampak sebagaimana diharapkan. Suatu kebijakan tidak akan ada artinya bila tidak dapat menjawab permasalahan yang ada, kecuali jika kebijakan yang dibuat sebagai kebijakan yang "asal jadi" atau bermuatan kepentingan tertentu sehingga efektivitasnya tidak ada.

Menurut Edward III dalam Subarsono (2009:38) Implementasi kebijakan di perlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun pandangan tersebut mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## II.2.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam realita sehari-hari masih dijumpai penggunaan pendekatan *top-down* guna memahami persoalan implementasi kebijakan, Menurut Wahab (2016:46), untuk memperkuat atau meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan tersebut, masih ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, yakni sebagai berikut :

## 1. Pendekatan – pendekatan Struktural (Stuctural Approaches)

Analisis organisasi modern telah memberikan sumbangan yang berharga pada studi implementasi, karena rancangan bangun kebijakan (*policy design*) dan rancangan bangun organisasi (*organization design*) sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersamaan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa struktur yang bersifat organis tampaknya amat cocok untuk situasi-situasi implementasi, dimana kita perlu merancang bangun struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang senantiasa berubah, bila dibandingkan dengan merancang bangun suatu struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang senantiasa berubah, bila dibandingkan dengan merancang bangun suatu struktur khusus untuk program sekali selesai. Namun, karena beberapa pertimbangan, bentuk struktur yang organisasi seringkali kurang dapat diterima di kalangan pemerintahan, seperti untuk pertanggungjawaban dan keharusan untuk bisa konsisten dalam menghadapi kasuskasus yang terjadi.

 Pendekatan-Pendekatan Prosedural dan Manajerial (Procedural and Manajerial Approaches)

Memiliki struktur-struktur yang cocok bagi implementasi program barangkali kurang begitu penting bila dibandingkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat, termasuk prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajerial yang relevan. Manajerial sebagai perwujudan pendekatan ini ialah perencanaan yang jaringan kerja dan pengawasan *netwok* 

planning and control (NPC) yang menyajikan suatu kerangka kerja proyek yang dapat direncanakan dan implementasinya dapat diawasi.

## 3. Pendekatan-Pendekatan Keperilakuan (*Behavioral Approaches*)

Pendekatan keperilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*). Apabila gejalagejala dan sebab-sebab timbulnya penolakan telah diketahui, maka resep yang disarankan oleh pendekatan keperilakuan yaitu seperti berikut ini:

- Menyediakan informasi yang lengkap terkait perubahan-perubahan yang diusulkan,
- b. Harus terdapat musyawarah yang ekstensif dengan pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh perubahan,
- Terus terang mengenai permasalahan dan segala akibat yang akan terjadi (komunikasi yang valid).

## 4. Pendekatan-Pendekatan Politik (*Political Approaches*)

Analisis mengenai aspek-aspek politik dari implementasi kebijakan ini makin penting bila menyangkut lembaga pemerintah, mengingat kenyataan bahwa sebagian besar kebijakan pemerintah pusat sebenarnya tidaklah dilaksanakan oleh kantor-kantor/ departemen/ kementerian pemerintah pusat. Pemerintah-pemerintah daerah dan instansi-instansi lain pada hakikatnya juga mengeluarkan kebijakan yang membutuhkan kesepakatan dari organisasi lainnya.

## II.2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

## 1. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

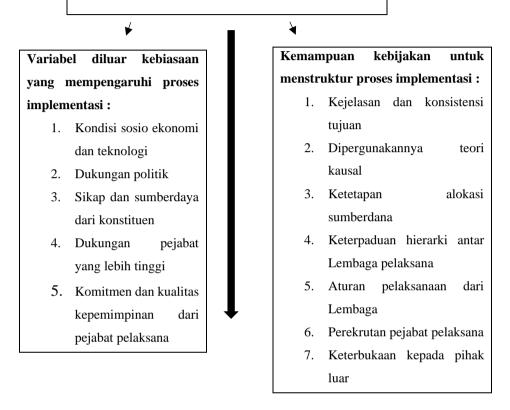
Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sabater dalam (Nugroho,2008:440) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

"implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statue but which can also take the form of important executives ordes of court decision. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be addressed stipulates the objective (s) to be pursued and in a vaiety of ways, 'structures' the implementation procees"

(Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk symbol tetapi juga dapat berupa keputusan penting eksekutif atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan itu mengidentifikasi masalah yang akan ditangani menetapkan tujuan yang akan dikejar dan dalam berbagai cara, 'struktur' proses implementasi).

#### Mudah-tidaknya masalah dikendalikan

- 1. Dukungan teori dan teknologi
- 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran
- 3. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki





Gambar II.1 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for implementation Analysis*). Duet Mazmanian Sabatier mengklarifikasikan proses secara implementasi kebijakan dalam tiga variabel.

- 1) Variabel *independent*, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang telah dikehendaki.
- 2) Variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara Lembaga pelaksana, aturan pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Variabel *independent*, yaitu tahapan dalan proses implementasi dengan tahapan pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

## 2. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan model *A policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana,dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino 2008:141-144).yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu :

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

## 2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi katika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Oleh karena itu, ketidaksesuaian sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel yang tersedia namun tidak diimbangi dengan kecukupan dana akan menjadi persoalan politik melalui anggaran untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, ketika sumberdaya manusia bekerja dengan anggaran dana yang sesuai namun tidak disertai dengan manajemen waktu yang baik, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek tersebut harus mempunyai karakteristik yang keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia maka bisa jadi agen pelaksana yang diturunkan tidak sesuai dengan karakter agen pelaksana yang diharapkan.

## 4. Sikap/ kecendurungan (Disposisi) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi dari warga setempat yang belum mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan, tetapi kebijakan yang implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui atau bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

## 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinai komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses impementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal yang selanjutnya perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang di tawarkan Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan lingkungan social, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk implementasi kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

## 1. Model George Edward III

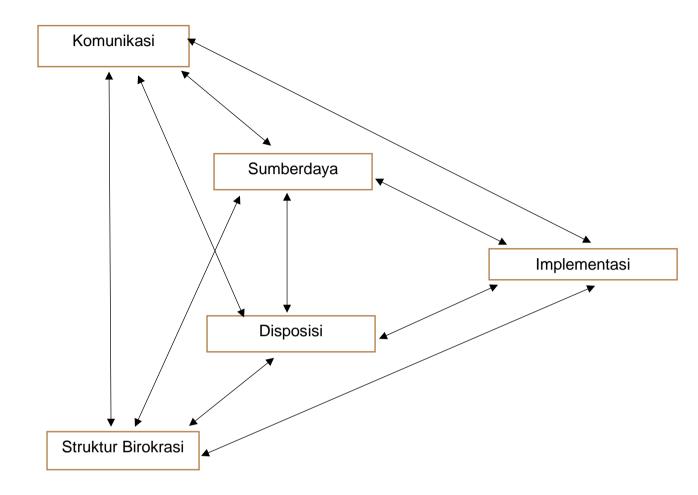
Edward (1980:10-11), mengemukakan model implementasi kebijakan publik terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

 a. Komunikasi, menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorasi atas kebijakan dan program ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- b. Sumberdaya, menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya finansial sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik serta menjadi lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan dengan efektif dan cepat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan.
- c. Diposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel era kepada implementor kebijakan/program karakter yang penting dimiliki

oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/ kebijakan kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam batas program yang telah digariskan dalam guideline program komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten sikap yang demokratis.

d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara tepat. Hal ini dapat terjadi jika stuktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hierarkis dan birokratis.



Gambar II.2. Model Implementasi Edward III

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki ketertarikan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya, saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan *mark up* dan korupsi atas dana program kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun Ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

#### 2. Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono. 2005:102) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis, faktor-faktor tersebut diantaranya:

#### a) Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan dipengaruhi oleh karakteristik politik lokal, kendala sumberdaya, sosio kultural, keterlibatan para penerima program dan tersedianya infrastruktur fisik yang cukup.

## b) Hubungan Antar Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi sasaran program. Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran implementasi dan evaluasi, ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi terkait dan efektifitas jejaring untuk mendukung program.

c) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Sumberdaya organisasi meliputi kontrol terhadap sumber

dana, keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan

program ketepatan alokasi anggaran, pendapatan dan birokrasi.

## d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Mencakup keterampilan teknis, manajerial dan politis petugas, kemampuan mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan komunikasi internal hubungan yang baik antara instansi dan kelompok sasaran, hubungan yang baik antara instansi dengan pihak di luar pemerintahan, kualitas pemimpin instansi dalam hierarki sistem administrasi.

## 3. Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Jones dalam Tahir (2015:81) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas tersebut adalah:

- 1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unitunit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
- 2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan menjadi pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- 3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

# II.3. Konsep Informasi

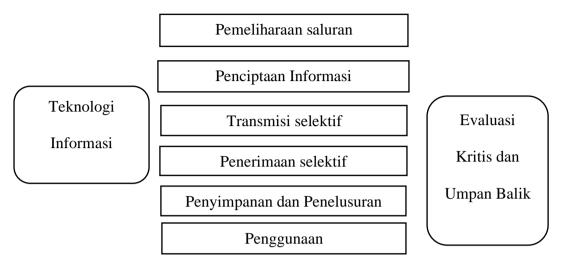
Siagian (2008:46), mengemukakan bahwa informasi telah menyentuh seluruh segi kehidupan dan penghidupan, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Pada tingkat individu misalnya, aneka ragam informasi dibutuhkan termasuk informasi tentang pendidikan, kesehatan, situasi pasar berbagai produk yang diperlukannya untuk memuaskan kebutuhannya, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Identifikasi dan pengenalan-pengenalan sumber-sumber informasi yang pantas dan layak digarap harus semakin relevan untuk diperhatikan agar menjamin bahwa data yang dikumpulkan untuk diolah bermutu tinggi dan proses penciptaan informasi tersebut harus diupayakan agar berlangsung dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

Dalam menciptakan Informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, kemutakhiran, kehandalan, terolah dengan baik tersimpan dengan rapi dan mudah ditelusuri dari tempat penyimpanannya apabila diperlukan persyaratan-persyaratan tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila data, yang merupakan bahan baku untuk informasi, digali dari sumbersumber yang tepat dan dengan mutu yang tinggi.

Agar penilaian yang dilakukan mencapai sasarannya diperlukan serangkaian standar penilaian. Sasaran penilaian antara lain adalah:

- a. Validitas informasi yang diterima
- b. Signifikansi informasi tersebut
- c. Kegunaan spesifiknya

d. Hubungan informasi tersebut dengan informasi lain.



Gambar II.3. Tahap-Tahap Penanganan Informasi

# II.4. Konsep Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Febrianingsih Nunuk (2012:136), informasi baik pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit untuk dijangkau masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan mengginakan segala jenis saluran yang tersedua. Jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terhadap semua orang dalam memperoleh informasi dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 berlaku dalam seluruh wilayah Indonesia sehingga segala hak dan kewajiban orang atas informasi publik dan kewajiban orang atas informasi publik atau pemohon dan pengguna informasi publik dan badan publik baik yang ada di tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten yang ditetapkan dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik tersebut berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintah kota/kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dan diberikannya peluang jaminan keterbukaan informasi publik di daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya, maka dibentuklah peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Jeneponto.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang informasi publik yang diperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepada kepentingan publik atau meresahkan kehidupan masyarakat.

Tujuan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
   dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Tujuan utama dibuatnya peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan

kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya termaktub dalam Peraturan Bupati Jeneponto No.41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (PPID) .

PPID bertujuan untuk memberikan prosedur bagi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan informasi publik, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dan meningkatkan pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, serta memudahkan dalam mewujudkannya dengan cara menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, transparan, bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang dimana pada Bab III, Pasal 4 Peraturan tersebut, dijelaskan bahwa untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, maka beberapa ruang lingkup yang harus diperhatikan yang meliputi poin-poin sebagai berikut:

- a. Akses informasi Publik dan Dokumentasi
- b. Hak dan kewajiban
- c. Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- d. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- e. Kelengkapan pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
- f. Jenis Infomrasi Publik
- g. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi
- h. Keberatan dan Sengketa Informasi

#### **II.5. Konsep Good Governance**

Good Governance dalam Manengal (2019:77) merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh, mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Addink (2019:18) mengemukakan bahwa:

"The term 'governance' has a non-normative content and therefore is a preference to use the term 'good governance' in the legal and normative non-legal disscussion."

Yang berarti, istilah 'governance' memiliki muatan yang non-normatif dan oleh karena itu merupakan preferensi untuk menggunakan istilah 'good governance' dalam pembahasan non-hukum yang legal dan normatif.

Dalam laporan penelitian berjudul *Our Global Neighbourhood* dalam jurnal Keping (2018), komisi tersebut mendefinisikan tata kelola sebagai berikut:

" governance is the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is a continuing process

through which conflicting or diverse interests may be accommodated and cooperative action may be taken. It includes formal institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal arrangements that people and institutions either have agreed to or perceive to be in their interest." It has four features: governance is not a set of rules or an activity, but a process; the process of governance is not based on control, but on coordination; it involves both public and private sectors; it is not a formal institution, but continuing interaction "

(Pemerintahan adalah hasil dari banyak cara individu dan institusi, publik dan swasta, mengelola urusan bersama mereka. Ini adalah proses berkelanjutan di mana kepentingan yang bertentangan atau beragam dapat diakomodasi dan tindakan kooperatif dapat diambil. Ini mencakup lembaga dan rezim formal yang diberdayakan untuk menegakkan kepatuhan, serta pengaturan informal yang telah disetujui atau dianggap oleh orang dan lembaga sesuai dengan kepentingan mereka. " Ia memiliki empat fitur: pemerintahan bukanlah seperangkat aturan atau aktivitas, tetapi sebuah proses; proses pemerintahan tidak didasarkan pada kontrol, tetapi pada koordinasi; ini melibatkan sektor publik dan swasta; itu bukan lembaga formal, tetapi interaksi yang berkelanjutan).

Dari segi fungsional, aspek; *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. *Governance* menurut definisi dari World Bank adalah "the way state power is used in managing economic anda social resources for development and society" (Syakriani, 2009:121).

Manengal Florensia (2019:77) governance dalam adalah penyelenggaran pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domaindomain. Secara konseptual pengertian tata kelola pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu, nilai menjunjung yang tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Menurut Rochman dalam Abdullah (2009:70) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Selanjutnya menurut Hardijanto dalam Santosa (2008:35) *Governance* mengandung makna yang lebih luas daripada *government*, karena tidak hanya mengandung arti sebagai proses pemerintahan, tetapi termasuk di dalamnya mencakup mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat dan swasta.

Berikutnya, Santosa (2008:131) mengemukakan bahwa prinsip dasar meliputi:

- Partisipatoris, Setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya)
- 2) Rule of law, harus ada prangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.

- 3) Transparansi, adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan. Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
- 4) Responsivennes, lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "basic needs" dan HAM (Hak sipil, hak politik,hak ekonomi,hak sosial dan hak budaya).
- 5) Konsensus, jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi consensus.
- 6) Berkeadilan, pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan pemerintah.
- 7) Persamaan hak, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
- 8) Efektifitas dan efisiensi, pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara dll.
- 9) Akuntabilitas, suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk pelaksanaan misinya.

## II.6. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yang menggunakan empat faktor penentu dalam teorinya untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Peneliti mengamati implementasi berdasar dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kabupaten Jeneponto menggunakan empat faktor dari Edward III. Dengan demikian indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto tertera pada gambar sebagai berikut:

Gambar II.4 Kerangka Pikir

